

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan sektor keuangan menjadi elemen strategis yang memegang peran penting dalam proses pembangunan ekonomi suatu negara. Sektor keuangan banyak diregulasi karena dianggap sebagai sektor yang mendukung perekonomian (Mishkin, 2009). Sektor keuangan berperan sebagai tulang punggung ekonomi karena mempunyai peranan yang vital dalam mendorong kegiatan ekonomi (Setiawan, 2015), sehingga dengan pengembangan sektor keuangan diharapkan sebagai fungsi intermediasi keuangan yang dapat berkembang dan menciptakan perekonomian yang lebih baik.

Menurut Bagehot (1873) memaparkan bahwa sektor keuangan secara signifikan mampu memicu pertumbuhan ekonomi melalui mobilisasi modal sektor perbankan. Hal yang sama juga dilakukan oleh Schumpeter (1965) mengidentifikasi hubungan pembangunan sektor keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi, hasil penelitiannya yaitu sektor intermediasi keuangan perbankan dengan alokasi yang dihasilkan dari tabungan untuk perusahaan dianggap berdampak untuk pertumbuhan produktivitas dan inovasi teknologi.

King dan Levine (1993) juga menunjukkan bahwa sistem keuangan terbukti dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Penelitian menggunakan data 80 negara dengan kurun waktu 1960-1989, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem keuangan terbukti dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, hal tersebut dilihat berdasarkan sejumlah indikator pembangunan keuangan yang menunjukkan korelasi yang kuat terhadap tingkat pertumbuhan

PDB riil per kapita, tingkat akumulasi modal fisik, dan perbaikan efisiensi dalam penggunaan modal fisik, serta peningkatan efisiensi ekonomi di masa mendatang.

Pertumbuhan ekonomi dapat dijadikan indikator yang tepat bagi proses pembangunan suatu negara bahkan wilayah regional karena pertumbuhan ekonomi dianggap dapat menggambarkan kondisi kesejahteraan masyarakat di wilayah regional, namun hal tersebut tetap harus dengan memperhatikan faktor lain seperti masalah ketimpangan pendapatan. Hipotesis Kuznets menyatakan bahwa meskipun pada tahap awal terjadi peningkatan GDP per kapita akan menyebabkan ketidakmerataan, namun peningkatan GDP perkapita juga memberikan dampak distribusi secara keseluruhan melalui: (1) Peningkatan pendapatan seluruh masyarakat, (2) peningkatan pendapatan dari kelompok kaya, (3) peningkatan pendapatan utama dari kelompok miskin (Purba, 2016). Biro Anggaran dan Pelaksanaan APBN memaparkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkualitas ialah pertumbuhan yang memperhitungkan pemerataan pendapatan dan kemiskinan (Purba, 2016).

Menurut Greenwood dan Jovanovic (1990) berdasarkan hipotesis Kuznets menunjukkan pada tahap awal pembangunan sektor keuangan akan mendorong ketidakmerataan namun setelah sektor keuangan berada dititik puncak maka ketimpangan akan berkurang karena sektor keuangan cenderung akan menguat. Hal tersebut menyiratkan adanya hipotesis berbentuk U-terbalik antara pengembangan sektor keuangan dan ketimpangan pendapatan (Tan dan Law, 2012). Kurangya akses ke keuangan telah lama diakui sebagai masalah potensial dalam memperluas kesenjangan antara si kaya dan si miskin.

Penelitian Clarke et al. (2006) menyelidiki hubungan antara sektor keuangan dan ketimpangan pendapatan untuk 83 negara mulai tahun 1960 hingga 1995 yang hasilnya mengungkapkan bahwa selain mendorong pertumbuhan, pengembangan keuangan juga mengurangi ketimpangan. Liang (2006a) menemukan hubungan non-linier dan linier antara pengembangan keuangan dan ketimpangan, menggunakan data Provinsi China mulai tahun 1991 hingga 2000 dan menunjukkan hasil pengembangan keuangan berdampak secara signifikan terhadap distribusi pendapatan di Cina. Penelitian yang sama dilakukan oleh Liang (2006b) namun menggunakan data yang berbeda dalam kurun waktu 1986-2000 meneliti tentang hubungan sektor keuangan dan ketimpangan di wilayah perkotaan China. Hasil empiris menunjukkan bahwa pengembangan keuangan China membantu secara drastis dalam mengurangi ketimpangan pendapatan di wilayah perkotaan China.

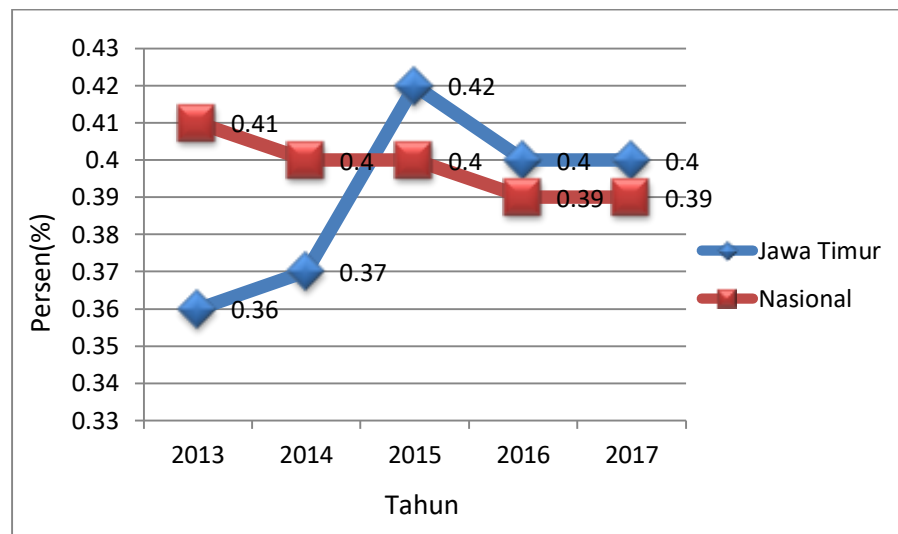
Kappel (2010) meneliti efek perkembangan sektor keuangan pada kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, menggunakan model regresi data panel. Variabel independen pengembangan sektor keuangan diukur dari sektor perbankan yaitu kredit swasta per PDB. Selain itu, juga diukur dari pengembangan sektor saham meliputi Kapitalisasi pasar saham terhadap PDB, Nilai total pasar saham yang diperdagangkan ke PDB, Rasio turnover pasar. Hasil menunjukkan bahwa ketimpangan dan kemiskinan berkurang tidak hanya melalui peningkatan pinjaman pasar namun juga melalui pasar saham yang lebih maju.

Pengaruh inklusi keuangan pada ketimpangan pendapatan di Asia diselidiki oleh Park dan Mercado (2015) Penelitian tersebut menguji pengaruh inklusi keuangan dengan variabel kontrol terhadap kemiskinan dan ketimpangan

pendapatan. Hasilnya inklusi keuangan memiliki efek pengurangan yang signifikan pada kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di negara-negara yang dipilih.

Neaime dan Gaysset (2018) menggunakan metode Generalized Method of Moments (GMM) dan Generalized Least Squares (GLS) dengan sampel dari delapan negara MENA selama periode 2002-2015. Penelitian ini secara empiris menganalisis dampak inklusi keuangan pada ketimpangan pendapatan, kemiskinan, dan stabilitas keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inklusi keuangan menurunkan pendapatan ketimpangan, sedangkan ukuran populasi dan inflasi ditemukan meningkatkan ketimpangan pendapatan. Hasil lainnya menunjukkan bahwa inklusi keuangan tidak memiliki dampak pada kemiskinan, sedangkan populasi, inflasi, dan Keterbukaan perdagangan ditemukan secara signifikan meningkatkan kemiskinan.

Kondisi ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur masih perlu diperhatikan. Penyebab masalah ketimpangan pendapatan yaitu tidak semua orang menerima penghasilan yang sama dari tiap aset, karena semakin terpusatnya sumber daya keuangan pada segelintir rumah tangga kaya yang mempunyai akses pada pasar finansial (The World Bank, 2015). Meskipun kondisi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur membaik namun terdapat ketimpangan yang memprihatinkan di 38 kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur (Pambudi, 2019). Gambar 1.1 merupakan data yang menunjukkan perkembangan indeks gini Provinsi Jawa Timur yaitu sebagai berikut:



Gambar 1.1
Perkembangan Gini Rasio Provinsi Jawa Timur dan Nasional
Tahun 2013-2017

Sumber: Data diolah dari BPS Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan gambar 1.1 dapat dilihat bahwa posisi gini rasio tahun 2013-2014 Provinsi Jawa Timur berada pada tingkat lebih rendah dibanding gini rasio nasional, namun tahun berikutnya yakni 2015-2017 gini rasio Provinsi Jawa Timur lebih tinggi dibandingkan dengan gini rasio tingkat nasional. Selain itu, tahun 2015 terjadi ketimpangan pendapatan tertinggi yakni sebesar 0,42 persen. Meskipun pada tahun berikutnya mengalami penurunan, masalah ketimpangan masih harus diperhatikan. Selain itu, hal tersebut juga menjadi alasan mengapa pada penelitian ini hanya mengambil provinsi Jawa Timur sebagai obyek penelitian karena pada tahun 2017 provinsi Jawa Timur termasuk sepuluh besar provinsi dengan tingkat ketimpangan pendapatan tertinggi dan masuk pada kategori ketimpangan sedang, sehingga hal tersebut apabila terus dibiarkan dapat memengaruhi perekonomian nasional padahal Jawa Timur merupakan provinsi yang berperan penting dan dianggap sebagai pusat kawasan timur Indonesia yang berkontribusi cukup tinggi dan signifikan terhadap perekonomian nasional. Oleh karena itu masih diperlukan berbagai upaya untuk mengentaskan

ketimpangan pendapatan salah satunya melalui pengembangan sektor keuangan.

Alasan mengambil penelitian pengaruh pengembangan sektor keuangan terutama sektor perbankan karena sektor perbankan mempunyai peran penting dalam meningkatkan akses dan penggunaan jasa keuangan kepada masyarakat, sehingga nantinya dapat berpengaruh pada peningkatan pendapatan masyarakat dan menurunnya tingkat ketimpangan pendapatan. Selain itu, penelitian terdahulu terkait pengaruh pengembangan sektor keuangan terutama pada sektor perbankan terhadap ketimpangan pendapatan pada tingkat wilayah regional bisa dibilang masih terbatas.

Studi ini berbeda dengan (Jaumotte 2008; Seven & Coskun 2016) yang menjelaskan bahwa secara signifikan pengembangan sektor keuangan berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan pada negara maju dan negara berkembang. Selain itu, mereka menggunakan indikator pengembangan sektor keuangan yang sama yaitu kredit sektor swasta terhadap pdb, Namun pada penelitian Jaumotte (2008) juga menggunakan variabel keterbukaan finansial meliputi: FDI, portofolio ekuitas, derivatif keuangan, dan total cadangan dikurangi emas. Sedangkan, pada penelitian ini diasumsikan bahwa pengembangan sektor keuangan berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan yang dicapai melalui rasio kredit per pdrb yang semakin besar maka mengindikasikan bahwa sektor keuangan semakin dalam (*financial deepening*) dan berarti akses kredit kepada masyarakat semakin tinggi (Lynch, 1996). sehingga terjadi penurunan ketimpangan pendapatan di tingkat wilayah regional kabupaten/kota provinsi Jawa Timur. Selain itu, indikator pengembangan sektor keuangan yang digunakan hanya pada lingkup sektor perbankan serta

menggunakan variabel faktor karakteristik wilayah untuk melihat pengaruhnya terhadap ketimpangan pendapatan.

Studi ini mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya oleh Supartoyo (2018) yaitu persamaanya adalah menganalisis pengaruh pengembangan sektor keuangan namun pada penelitian tersebut hanya pada lingkup Badan Perkreditan Rakyat sedangkan pada penelitian ini pada sektor perbankan dan menggunakan variabel sektor keuangan antara lain aset, kredit, dan dana pihak ketiga. Perbedaannya yaitu penelitian tersebut menganalisis bagaimana pengaruh sektor keuangan terhadap perekonomian regional, sedangkan pada penelitian ini menganalisis bagaimana pengembangan sektor keuangan perbankan berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Selain itu, metode analisis yang digunakan juga berbeda penelitian tersebut menggunakan metode analisis regresi komponen utama sedangkan penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel untuk melihat pengaruhnya di kabupaten/kota provinsi jawa timur.

Berdasarkan uraian diatas maka untuk mengatasi ketimpangan pendapatan pada penelitian ini mengambil judul “pengaruh pengembangan sektor keuangan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada maka rumusan masalah dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pengembangan sektor keuangan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur?
2. Bagaimana pengaruh faktor-faktor karakteristik wilayah terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh pembangunan sektor keuangan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur.
2. Menganalisis pengaruh faktor-faktor karakteristik wilayah terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian maka diharapkan penelitian dapat bermanfaat bagi beberapa pihak diantaranya:

1. Bagi pembaca, dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan serta dapat dijadikan referensi mengenai pengaruh dari pengembangan sektor keuangan terhadap ketimpangan pendapatan.
2. Bagi peneliti, dapat memperoleh gambaran tentang respon pengembangan sektor keuangan dan faktor karakteristik wilayah terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur.
3. Bagi pemerintah, menjadi sarana diagnosis untuk menentukan kebijakan yang tepat dalam mengatasi ketimpangan pendapatan terutama dibidang pengembangan sektor keuangan.